

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)  
KECAMATAN PRAYA TIMUR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah termasuk penyusunan LKj-IP Kecamatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan ini merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Praya Timur pada Tahun Anggaran 2024. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui capaian kinerja tersebut maka dapat diukur sejauh mana sasaran output dan outcome dapat direalisasikan.

Informasi yang terangkum tersebut tentunya akan sangat berguna tidak hanya dalam konteks mengukur keberhasilan yang dicapai tetapi lebih jauh lagi sebagai masukan atau bahan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan sekarang ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga apa yang kami sajikan ini mempunyai kontribusi yang besar bagi Kecamatan Praya Timur khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dalam berkiprah membangun daerah tercinta ini. Amin

Praya Timur, Januari 2025



**CAMAT PRAYA TIMUR,**

**ALU FATHURRAHMAN, SH**

NIP. 196712311986021020

DAFTAR ISI

SAMPUL.....

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... II

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... IV

BAB I PENDAHULUAN..... 1

    I.1 Tugas, Fungsi OPD ..... 1

    I.2 Data Kepegawaian ..... 3

    I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 6

    II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah ..... 6

    II.2 Rencana Kerja Tahunan ..... 11

    II.3 Indikator Kinerja Utama ..... 11

    II.2 Perjanjian Kinerja OPD tahun 2022 ..... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 13

    III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ..... 13

    III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah ..... 14

    III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya ..... 19

    III.4. Akuntabilitas Keuangan..... 21

BAB IV PENUTUP..... 31

## **Daftar Lampiran**

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
2. Rencana Aksi Tahun 2024
3. Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 untuk penilaian Nilai SAKIP PD.
4. Laporan Hasil Pengolahan Data atas Survey Kepuasan Masyarakat.
5. Form Penilaian Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.
6. Rekap Data Gangguan Trantibum.
7. Form Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Praya Timur Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Timur menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Kantor Camat Praya Timur menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Praya Timur. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan	25 %	23 %	75%
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	200	200	100%
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP PD	B	B	100%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	79	99%
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa cepat berkembang	93 %	93 %	100 %

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Kantor Camat Praya Timur belum mencapai 100 %.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Praya Timur

##### 1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka **meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/kelurahan.**

##### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 12 Kecamatan yang ada yang memiliki Tugas Pokok menurut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, disebutkan bahwa **Tugas Pokok** Kecamatan adalah :

1. Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;

- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan kecamatan mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaran kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.



## 1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai di kecamatan Praya Timur , Menurut keadaan sampai bulan Desember 2024 Kecamatan Praya Timur mempunyai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang. Pegawai sejumlah 16 tersebut ditempatkan pada Kantor Camat Praya Timur sejumlah 13 orang, dan adapun pada Desa selaku Pj Kepala Desa sebanyak 3 orang.

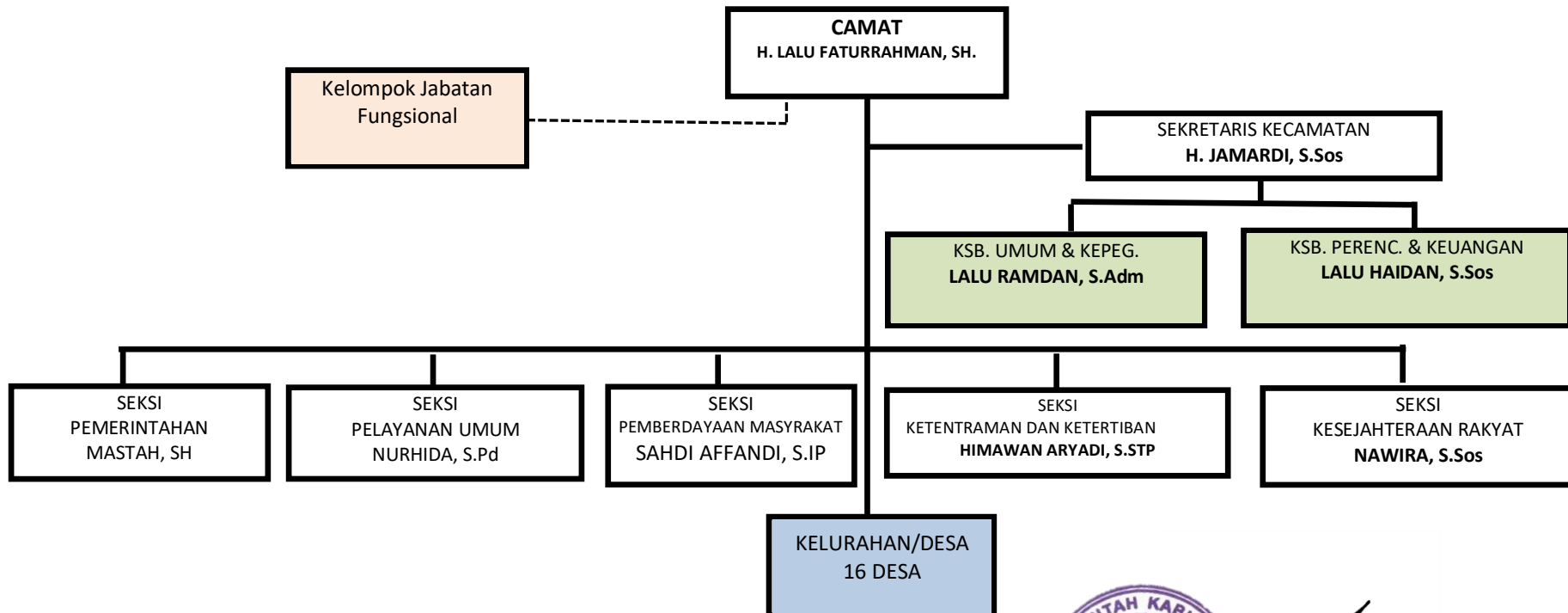
NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	<b>ESELON:</b> a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	- 1 1 5 2
2	<b>PANGKAT /GOLONGAN:</b> a. IV.b b. IV.a c. III.d d. III.b e. III.a f. II.c g. II.a	1 1 5 4 3 1 1
3	<b>JENJANG PENDIDIKAN:</b> a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- - 23 - 3 -

### 1.3 Struktur Organisasi Kantor Camat Praya Timur Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016

#### Bagan Struktur Organisasi Lengkap dengan Nama Pejabat

Kecamatan Kab. Lombok Tengah

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah  
Nomor : 90 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Desember 2016  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Pokok dan Fungsi



**CAMAT PRAJA TIMUR,**

**LALU FATHURRAHMAN, SH.**

NIP.: 196712311986021020

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: ” **MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA**”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;**
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Kantor Camat Praya Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke – 3 yaitu : **“Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur. Renstra Kantor Camat Praya Timur 2022-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur.

##### **2.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Camat Praya Timur Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan dari Kecamatan adalah **“Meningkatnya Kinerja Kecamatan”**

2.2.1 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

KETERKAITAN (INTERELASI)			
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026			
KANTOR CAMAT PRAJA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH			
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja kecamatan		Nilai Kinerja Camat
1.1		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP PD
1.2		Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
1.3		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang di kecamatan
1.4		Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/Kelurahan

2.3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

VISI :	MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA			
MISI 3 :	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2 Meningkatnya kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan
				Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam pengendalian trantibum	Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

2.4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2024, Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kode	SKPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Ket.
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.002.692.875	
7 01 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.705.000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.680.000	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	1.350.000	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.225.000	
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	600.000	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.850.000	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.768.891.830	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.756.282.830	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.295.000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.314.000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.043.659	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.947.168	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.093.198	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.043.293	

7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.960.000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.611.886	
7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	9.094.074	
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.517.812	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.899.200	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.899.200	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.541.300	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.541.300	
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>84.890.000</b>	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.890.000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	84.890.000	
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>49.286.982</b>	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.286.982	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49.286.982	
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	-	
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>404.435.605</b>	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	404.435.605	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	404.435.605	
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>45.340.000</b>	
7 01 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.340.000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.000.000	
7 01 06 2.01 0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.340.000	

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Praya Timur berdasarkan Renja Tahun Anggaran 2024. (Terlampir).

Rencana Kerja Tahunan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran pertriwulan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah dibuat.

Rencana Aksi Tahun 2024 terlampir.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Timur sesuai dengan dokumen Renstra Kantor Camat Praya Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR CAMAT PRAJA TIMUR  
TAHUNA ANGGARAN 2023

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DEVINISI OPERASIONAL	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	TAR GET 2023	REALIS ASI 2023	CAP AIN REAL ISASI %
sasaran	Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan	Data gangguan trantibum desa yang diperoleh dari rekap tahunan data gangguan trantibum diwilayah kecamatan	Jumlah persentase kejadian tahun awal renstra dikurangi jumlah persentase kejadian tahun ini (kejadian tahun ini dibagi kejadian tahun awal renstra x 100)	25 %	23 %	75%
Tujuan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Camat	Nilai hasil evaualsi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Penilaian dari APU (instumen Monev)	200	200	100%
sasaran	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP PD	Nilai hasil akuntabilitas kinerja kecamatan	Penilaian Inspektorat (instrumen SAKIP)	B	B	100%
sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil	Total dari nilai pengisi per unsur di bagi total unsur yang terisi di kali nilai penimbang	80	79	99%



			pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya				
sasaran	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa cepat berkembang	Data nilai evaluasi tingkat perkembangan desa oleh kecamatan yang diperolrh dari monitoring dan evalusai oleh tim kecamatan terhadap nilai evaluasi mandiri desa	Jumlah deswa cepat berkembang di bagi jumlah desa di kali seratus	93 %	93 %	100 %

### 2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ketiga Kantor Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Renstra 2021 - 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2023 tersebut mencerminkan capaian ketiga renstra Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya peranserta masyarakat dan steke holder terkait dalam pengendalian trantibum	Persentase pengendali an trantibum yang melibatka n	25 %

Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai  Kinerja  Camat	200
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai  SAKIP PD	B
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM)	81
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa cepat berkempa ng	93 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.002.692.875	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.890.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.286.982	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	404.435.605	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.340000	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.480.202.225,- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian                    =                    
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian                    =                    
$$\frac{(\text{Rencana})-(\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Kantor Camat Praya Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Praya Timur Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. SASARAN NO 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan

Sasaran No 1 **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan** di ukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Predikat/Nilai SAKIP PD**  
Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi Tahun sebelumnya	Target akhir renstra	Sumber Data
Predikat/Nilai SAKIP PD	Predikat	B	B	85	CC	B	Inspektorat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan**” dengan indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” pada Kantor Camat Praya Timur menghasilkan capaian kinerja dengan kriteria “**Cukup**”.

Adapun penjelasan pencapaian indikator meliputi:

a. Indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**”.

Capaian indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” tahun 2024 adalah “**Cukup**” dari target Predikat B berada pada interval predikat CUKUP sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” adalah KURANG, berada pada interval KURANG.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Timur pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” :

$$\frac{51}{60} \times 100\% = 85 \%$$

- ✓ “**Predikat/Nilai SAKIP PD**” merupakan Indikator ke-1 dari Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Timur.
- ✓ Jenis Penilaian di berikan oleh Inspektorat setiap Tahun melalui E-SAKIP Review.
- ✓ Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terlampir.

## 2. Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran No 2 adalah “**Meningkatnya kualitas layanan publik**” tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu: **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi Tahun sebelumnya	Target akhir renstra	Sumber Data
Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	80	99	80	B	Kasi Pelayanan

Capaian indikator “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat “ tahun 2024 sebesar 80 poin atau 99 % dari Target sebesar 81 poin sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat” sebesar 81 Poin atau sebesar 80 % dengan kriteria “Kurang” dari target sebesar 81 poin.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Timur pada Tahun 2024 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

**Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan :**

$$\frac{80}{81} \times 100\% = 99 \%$$

- ✓ Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat merupakan indikator Sasaran ke 2 yang dimasukkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026.
- ✓ SOP pelaksanaan kegiatan belum di buat sesuai Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal lain yang menjadi perhatian adalah Sumber daya aparatur masih kurang memadai dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang di gunakan Memuat karaktarestik populasi, keterwakilan anggota sampel dan jumlah responden, selain itu disajikan jumlah responden yang berhasil di kumpulkan dan yang berhasil di tindak lanjuti. Kuisisioner survey langsung diberikan kepada penerima layanan kecuali bagi orang tua yang kurang bisa dalam hal baca tulis, petugas survey langsung menanyakan dalam bentuk wawancara. *Pengolahan data hasil survey terlampir.*

3. **Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan**

Sasaran No 3 adalah “**Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa**” tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan.** Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi Tahun sebelumnya	Target akhir renstra	Sumber Data
Persentase Desa cepat berkembang di kecamatan	Persen	93	93	100	90	B	Kasi PMD

Capaian indikator “**Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan**” tahun 2024 sebesar 69 % atau sebesar 100 % dengan kriteria “**Baik**” dari target sebesar 69 % sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator “**Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan**” sebesar 69 % atau 100 % dari Target sebesar 69 % dengan Kriteria “**Baik**” .

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Timur pada Tahun 2022 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

1. **Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan :**
- $$\frac{69 \%}{100 \%} \times 100 \% = 69 \%$$

69 %

- ✓ **“Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang di Kecamatan”** merupakan Indikator dari sasaran **“Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan”** yang telah dirumuskan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Jenis pendataan menggunakan form Rekap Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dievaluasi oleh Seksi PMD.
- ✓ Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan terlampir.

4. **Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa/Kelurahan**

Sasaran No 4 adalah **“Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa/Kelurahan”** tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : **Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/Kelurahan.**

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 4 Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun sebelumnya	Target akhir renstra	Sumber Data
Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	Persen	25	23	84	20	B	Kasi Trantib

Capaian indikator **“Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa.”** tahun 2024 sebesar 21 % atau sebesar 84 % dengan kriteria **“Cukup”** dari target sebesar 25 % sedangkan pada tahun 2023 untuk Indikator **“Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/Kelurahan.”** sebesar 18 % atau 90 % dari Target sebesar 23% dengan Kriteria **“Cukup”** .

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian = realisasi x 100%

Rencana tingkat pencapaian rencana

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Kecamatan Praya Timur pada Tahun 2022 sesuai dengan table di atas sebagai berikut :

**Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/Kelurahan :**

$$\frac{21 \%}{25 \%} \times 100\% = 84 \%$$

25 %

- ✓ **“Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa”** merupakan Indikator dari sasaran **“Terwujudnya Stabilitas Sosial Masyarakat di Desa/Kelurahan”** yang telah dirumuskan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Jenis pendataan menggunakan form Rekap Daftar Gangguan Trantibum di Desa dan Kelurahan setiap tahun.
- ✓ Hasil Rekap Daftar Gangguan Trantibum di Desa dan Kelurahan terlampir.



III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efesiensi SDM dan Aset.

REKAFITULASI JABATAN PADA KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama jabatan	Es.	kelas jabatan	jumlah		
				Bezetting	kebutuhan	lebih/kurang
A	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA					
1	CAMAT PRAYA TIMUR	III/a	12	1	1	0
2	SEKRETARIS KECAMATAN	III/b	11	1	1	0
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV/b	8	1	1	0
	PENGADMINISTRASI PERSURATAN		5	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		5	0	1	-1
	PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER		5	0	1	-1
	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH		6	1	1	0
	PENGEMUDI		3	1	1	0
4	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV/b	8	1	1	0
	BENDAHARA (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN)		7	1	1	0
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN		5	0	1	-1
	PENGELOLA DATA		6	0	1	-1
	PENYUSUN ANGGARAN DAN PELAPORAN		7	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM		5	0	1	-1
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	IV/a	9	1	1	0
	PENYUSUN PENCATATAN, DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN		7	1	1	0
	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN		5	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI UMUM		5	0	1	-1
6	KEPALA SEKSI TRANTIB	IV/a	8	1	1	0
	PENGELOLA DATA TRANTIB		6	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI UMUM		5	1	1	0
7	KEPALA SEKSI PMD	IV/a	8	1	1	0
	PENGELOLA DATA PMD		6	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI UMUM		5	0	1	-1
8	KEPALA SEKSI KESRA	IV/a	8	1	1	0
	PENGELOLA DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL		6	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI UMUM		5	0	1	-1
9	KEPALA SEKSI PELAYAN UMUM	IV/a	8	1	1	0
	PENGOLAH DATA PELAYANAN		6	0	1	-1
	PENGADMINISTRASI PERIZINAN		5	1	1	0
	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		5	1	1	0
TOTAL				16	31	-15

Pada tahun 2024, Kantor Camat Praya Timur mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh seksi teknis sebanyak 16 pegawai dimana kekurangan di Kantor Camat Praya Timur sebanyak 16 pegawai. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Kantor Camat Praya Timur dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Kantor Camat Praya Timur tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

**Aset Kantor Camat Praya Tengah Tahun 2024**

**REKAP ASET KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR TERCATAT S.D TAHUN 2024**

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah objek tiap jenis
1.	KIB A	787.250	Objek aset
2.	KIB B	1.042.309,18	Objek aset
3.	KIB C	921.584,81	Objek aset
4.	KIB D	10.187,50	Objek aset
5.	KIB E	2.070	Objek aset
Jumlah		2.763.401,49	

**Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :**

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah objek tiap jenis
1	KIB A		
2	KIB B		
3	KIB C		
4	KIB D		
5	KIB E		
Jumlah		-	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukan bahwa Kantor Camat Praya Timur telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

**b. Analisis Efisiensi Anggaran**

Beberapa pelaksanaan Kegiatan di kolaborasikan dengan instansi lain seperti pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Untuk kegiatan Pramusrenbang ada bantuan Anggaran dari Bapperida Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Pelaksanaan MTQ/STQ Kabupaten, ada bantuan anggaran dari Bagian KESRA SETDA Kabupaten Lombok Tengah.

**III.4. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Praya Timur dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024

- REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR TAHUN 2024

Adapun akuntabilitas keuangan pada Kantor Camat Praya Timur kami paparkan berdasarkan rincian DPA Kantor Camat Praya Timur yang didalamnya termuat anggaran dan realisasi keuangan Kantor Camat Praya Timur



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	(4 / 3) *	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	13.271.786,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	13.271.786,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	13.271.786,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	13.271.786,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	13.271.786,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	13.271.786,00
5	BELANJA DAERAH	2.480.202.225,00	2.425.398.940,00	97,79	2.773.834.423,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.433.143.642,00	2.387.493.940,00	98,12	2.324.179.423,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.653.853.593,00	1.644.425.871,00	99,43	1.570.066.858,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.110.240.627,00	1.101.846.837,00	99,24	1.063.294.048,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	539.598.966,00	538.565.034,00	99,81	503.020.810,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.014.000,00	4.014.000,00	100,00	3.752.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.290.049,00	743.068.069,00	95,35	754.112.565,00
5.1.02.01	Belanja Barang	449.202.056,00	433.902.350,00	96,59	448.797.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	282.427.993,00	264.729.799,00	93,73	238.707.045,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	1.830.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.160.000,00	16.935.920,00	84,01	11.777.920,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	53.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.433.143.642,00	2.387.493.940,00	98,12	2.324.179.423,00
5.2	BELANJA MODAL	47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	449.655.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	264.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tan	36.615.486,00	27.705.000,00	75,66	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.297.132,00	1.200.000,00	92,51	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.145.965,00	9.000.000,00	98,40	19.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	185.655.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	185.655.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	449.655.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.480.202.225,00	2.425.398.940,00	97,79	2.773.834.423,00
	SURPLUS/DEFISIT	( 2.480.202.225,00 )	( 2.425.398.940,00 )	97,79	( 2.760.562.637,00 )
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	( 2.480.202.225,00 )	( 2.425.398.940,00 )	97,79	( 2.760.562.637,00 )

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.433.143.642,00	2.387.493.940,00	98,12	2.324.179.423,00
2.	Belanja Modal	47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	264.000.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.480.202.2250,00	2.425.398.9400,00	97,79	2.773.834.4230,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.387.493.940,00 atau mencapai 98,12% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp2.433.143.642,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.653.853.593,00	1.644.425.871,00	99,43	1.570.066.858,00
2	Belanja Barang Jasa	779.290.049,00	743.068.069,00	95,35	754.112.565,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		2.433.143.642,00	2.387.493.940,00	98,12	2.324.179.423,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.644.425.871,00 atau mencapai 99,43% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp1.653.853.593,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai					
	a.	Gaji dan Tunjangan	1.110.240.627,00	1.101.846.837,00	99,24	1.063.294.048,00
	1	Belanja Gaji Pokok ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Belanja Gaji Pokok PNS	856.940.768,00	854.527.648,00	99,72	825.456.100,00
		Belanja Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	539.598.966,00	538.565.034,00	99,81	503.020.810,00
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	539.598.966,00	538.565.034,00	99,81	503.020.810,00
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	72.710.000,00	71,890,000,00	98,87	60.900.000,00
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	72.710.000,00	71,890,000,00	98,87	60.900.000,00
		Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.980.000,00	20.100.000,00	95,81	27.340.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.980.000,00	20.100.000,00	95,81	27.340.000,00
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	5	Belanja Tunjangan Beras ASN	53.780.300,00	51.780.300,00	96,28	53.445.960,00
		Belanja Tunjangan Beras PNS	53.780.300,00	51.780.300,00	96,28	53.445.960,00
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.263.531,00	1.891.640,00	83,57	2.483.253,00
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.263.531,00	1.891.640,00	83,57	2.483.253,00
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.261.498,00	106.67,00	0,85	124.17,00
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.261.498,00	106.67,00	0,85	124.17,00
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.959.8966,00	53.856.5034,00	99,81	50.302.0810,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.959.8966,00	53.856.5034,00	99,81	50.302.0810,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	dst	0,00	0,00	0,00	0,00
		dst	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	53.959.8966,00	53.856.5034,00	99,81	50.302.0810,00
	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.959.8966,00	53.856.5034,00	99,81	50.302.0810,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.959.8966,00	53.856.5034,00	99,81	50.302.0810,00
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Honorarium	2.814.000,00	2.8140.000,00	100,00	3.752.000,00
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.814.000,00	2.814.000,00	100,00	3.752.000,00
	2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
	Jumlah		1.653.853.593,00	1.644.425.871,00	99,43	1.570.066.858,00

Sebab-sebab tinggi capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dari TA 2023 dikarenakan adanya kenaikan gaji Pegawai berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan kesembilan belas dari PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp743.068.069,00 atau mencapai 95,35% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp 779.290.049,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2024			Rp2.023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	<b>Belanja Barang</b>	<b>449.202.056,00</b>	<b>433.902.350,00</b>	<b>96,59</b>	<b>448.797.600,00</b>
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>449.202.056,00</b>	<b>433.902.350,00</b>	<b>96,59</b>	<b>448.797.600,00</b>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.847.200,00	82.317.350,00	92,65	59.002.300,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.664.218,00	25.573.000,00	99,64	44.646.300,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.240.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.596.596,00	10.480.000,00	98,90	9.670.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.636.510,00	10.370.000,00	97,49	17.788.000,00
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.012.388,00	38.372.000,00	98,36	47.821.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	237.930.000,00	230.550.000,00	96,90	231.380.000,00
	Belanja Pakaian Paskibraka	34.515.144,00	34.240.000,00	99,20	26.160.000,00
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>282.427.993,00</b>	<b>264.729.799,00</b>	<b>93,73</b>	<b>238.707.045,00</b>
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>113.033.300,00</b>	<b>96.937.299,00</b>	<b>85,76</b>	<b>91.533.045,00</b>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00	12.000.000,00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	Belanja Jasa Tata Rias				
	Belanja Tagihan Air	13.720.000,00	13.550.192,00	98,76	7.001.999,00
	Belanja Tagihan Listrik	14.203.200,00	3.291.714,00		10.336.846,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.976.000,00	8.210.059,00	91,47	7.298.700,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.334.100,00	3.085.334,00	42,07	1.015.500,00
	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>105.814.693,00</b>	<b>104.842.500,00</b>	<b>99,08</b>	<b>70.874.000,00</b>
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.814.693,00	104.842.500,00	99,08	64.874.000,00
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300.000,00</b>
	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900.000,00</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>63.580.000,00</b>	<b>62.950.000,00</b>	<b>99,01</b>	<b>50.100.000,00</b>
	Belanja Sosialisasi	55.780.000,00	55.150.000,00	98,87	50.100.000,00
	Belanja Bimbingan Teknis	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00

No.	Uraian	2024			Rp2.023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.160.000,00</b>	<b>16.935.920,00</b>	<b>84,01</b>	<b>11.777.920,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.160.000,00	16.935.920,00	84,01	11.777.920,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.160.000,00	10.135.920,00	77,02	6.957.920,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	6.800.000,00	97,14	4.820.000,00
	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.000.000,00</b>
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	53.000.000,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	53.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>779.290.049,00</b>	<b>743.068.069,00</b>	<b>95,35</b>	<b>754.112.565,00</b>

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A 2024 dibanding T.A 2023 dikarenakan di tahun sebelumnya terdapat belanja rehab Gedung dan Bangunan yang membutuhkan biaya Jasa Konsultasi.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp37.905.000,00 atau mencapai 80,55% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp47.058.583,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	264.000.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	185.655.000,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	449.655.000,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut..

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp37.905.000,00 atau mencapai 80,55% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.058.583,00. dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.6. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.615.486,00	27.705.000,00	75,66	0,00
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.297.132,00	1.200.000,00	92,51	0,00
	Belanja Modal Komputer	9.145.965,00	9.000.000,00	98,40	19.000.000,00
	Jumlah	47.058.583,00	37.905.000,00	80,55	264.000.000,00

Penyerapan anggaran belanja sesuai DPA Kantor Camat Praya Timur TA. 2024 sebesar Rp. 2.425.398.940 atau sebesar 97,79 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.480.202.225,-. Dengan melihat realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 98 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.5

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2023

KINERJA						KEUANGAN			
No	Sasaran Strategis	indikator kinerja	Targe t	Realisas i	%	Program	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Kinerja Kecamatan	200	200	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.002.692.875	2.194.150.323	98
2	meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP PD	B	B	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.890.000	75.320.000	89
3	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	80	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.286.982	48.962.000	99
4	meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase desa cepat berkembang	93	93	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.425.000	27.404.300	100
5	terwujudnya stabilitas sosial masyarakat di desa	persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa	25	23	84	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	404.435.605	404.435.605	100
6						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000	28.000.000	100
						JUMLAH ANGGARAN	2.480.202.225	2.425.398.940	98

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum Kantor Camat Praya Timur telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan berubahnya Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Praya Timur sesuai dengan Renstra Kantor Camat Praya Timur Tahun Anggaran 2021 -2026, dengan Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Tujuan : “Nilai Kinerja Camat”;
  - ✓ Indikator Sasaran : “Nilai SAKIP PD”
  - ✓ Indikator Sasaran : “Indeks Kepuasan Masyarakat”
  - ✓ Indikator Sasaran : “Persentase desa cepat berkembang di kecamatan”
  - ✓ Indikator Sasaran : “Persentase penurunan gangguan trantibum di wilayah desa/ Kelurahan”

Maka Kecamatan Praya Timur telah merubah semua dokumen yang berkaitan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Renstra 2021 -2026 sehingga semua Dokumen perencanaan untuk mengukur kinerja SKPD dapat terealisasi dengan baik.

Capaian Tujuan dan Sasaran pada tahun 2024 sudah bisa diukur secara keseluruhan, Nilai SAKIP Kecamatan akan dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Nilai Kinerja Camat diukur/dihitung oleh Bagian APU Setda Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan sudah bisa dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indikator Sasaran lainnya bisa dihitung berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data oleh Kecamatan. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Praya Timur Tahun 2024 ini dapat mewujudkan pelayanan menuju *good governant*



**CAMAT PRAYA TIMUR,**

**FALU FATHURRAHMAN, SH**

NIP. 196712311986021020